



---

# FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI

---

ISSN: 1411-1594

VOLUME 3 NO. 3, FEBRUARI 2002



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS  
WIDYATAMA

Mengapa Pemimpin Tidak Mampu Memimpin  
Iwan Ridwansyah, S.E.

Tekanan Lingkungan Eksternal  
Membutuhkan Perubahan Mendasar Dalam Organisasi  
Suskim Riantani, S.E.

Indikator Perkembangan Ekonomi Kota Bandung  
Dan Implikasinya Terhadap Pengambilan Kebijakan  
Ganjar Garibaldi, S.E.

Masalah Pencatatan Akuntansi  
Dalam Perolehan Aktiva Tetap  
Rafael G. Aida W., S.E.

Cara-Cara Mengalokasikan Lisensi Impor  
Drs. Andi Supangat, M.Si.

---

---

## UNIVERSITAS WIDYATAMA

---

---

# Indikator Perkembangan Ekonomi Kota Bandung dan Implikasinya Terhadap Pengambilan Kebijakan

Ganjar Garibaldi, S.E.

Kota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat mempunyai karakteristik ekonomi yang cukup dominan. Dari total PDRB Jawa Barat tanpa migas, sekitar 9% sampai dengan 10%-nya merupakan kontribusi dari PDRB kota Bandung. Hal ini memberikan posisi yang cukup signifikan bagi posisi kota Bandung dalam perekonomian Jawa Barat pada umumnya.

Munculnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada kuartal terakhir tahun 1997 telah menyebabkan banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas. Hal ini tentu saja akan menyebabkan berubahnya konstelasi struktur perekonomian yang telah terbentuk pada tahun-tahun sebelumnya. Kota Bandung yang selama ini dikenal aktif secara ekonomi juga mungkin tidak luput dari perubahan tersebut.

Tulisan singkat ini akan memberikan gambaran situasi ekonomi kota Bandung setelah krisis ekonomi dengan menggunakan indikator PDRB setempat selama beberapa tahun setelah terjadinya krisis. Bagian pertama akan mengulas tentang perkembangan struktur perekonomian kota Bandung. Bagian kedua dari tulisan ini akan mengulas tentang kecenderungan ke depan dari perekonomian kota Bandung dilihat dari sisi pertumbuhan PDRB secara sektoral. Bagian ketiga dari tulisan ini akan melihat sisi perkembangan tingkat harga umum di kota Bandung serta implikasinya terhadap kegiatan perekonomian; sedangkan bagian terakhir akan menutup tulisan ini dengan menyajikan beberapa kesimpulan penting dari hasil observasi terhadap data terakhir PDRB kota Bandung dan beberapa implikasi umumnya terhadap pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi setempat.

## 1. Perkembangan Sektoral dan Struktur Ekonomi Kota Bandung

Peningkatan ekonomi suatu daerah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat, ukuran yang paling banyak digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto. Meskipun bukan merupakan pengukuran yang sempurna, tetapi tetap merupakan suatu pendekatan yang baik untuk pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah. Metoda pengukuran PDRB dapat diukur dengan menggunakan (1) pendekatan produksi, (2) pendekatan pendapatan dan (3) pendekatan pengeluaran.

Pada kebanyakan studi di Indonesia, pendekatan produksi lebih banyak digunakan sebagai patokan pengukuran kinerja pembangunan suatu daerah. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang digunakan biasanya dikelompokkan menjadi 11 sektor atau lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas dan air minum, (5) Bangunan, (6) Perdagangan (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Bank dan lembaga keuangan lainnya, (9) Sewa rumah, (10) pemerintahan (11) Jasa-jasa. Secara lebih spesifik, pengelompokan ini dapat digabungkan menjadi lebih sederhana ke dalam (1) Sektor pertanian, (2) Sektor Industri, (3) Sektor jasa dan (4) Sektor informal.

Dengan melihat perkembangan data PDRB Kota Bandung pada periode 1997-2000, maka dapat terlihat pola perkembangan yang terjadi dalam kegiatan perekonomian Kota Bandung sejak terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997. Untuk melihat perkembangan tersebut, maka akan dilihat perkembangan data PDRB berdasarkan harga nominal maupun berdasarkan harga konstan 1993.

Kedua tabel berikut ini menunjukkan perkembangan PDRB berdasarkan sektor-sektor ekonomi untuk tahun 1997-1998.

Berikut ini akan disajikan dua buah tabel tentang perkembangan PDRB kota Bandung pada periode 1997-2000. Tabel pertama berisi perkembangan PDRB kota Bandung berdasarkan harga berlaku, sedangkan tabel ke dua akan berisi data

perkembangan PDRB kota Bandung berdasarkan harga konstan tahun 1993. Dengan membandingkan kedua tabel tersebut, akan terlihat perbedaan kecenderungan yang terjadi pada aktivitas ekonomi secara riil dengan kecenderungan yang terjadi pada aktivitas perekonomian yang terlihat sehari-hari.

**Tabel 1. Nilai produk Domestik Bruto Kota Bandung Atas Harga Berlaku (dalam jutaan Rupiah)**

Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000
Pertanian	27,560	59,730	62,297	68,851
Pertambangan dan Hasil-Hasilnya				
Industri Pengolahan	2,482,841	3,536,188	3,834,032	4,286,419
Listrik, Gas dan Air Bersih	192,892	233,517	277,732	310,643
Bangunan/Konstruksi	658,557	720,922	744,639	768,317
Perdagangan	2,970,779	4,327,249	4,619,821	5,260,936
Pengangkutan dan Komunikasi	682,450	931,075	1,073,951	1,290,779
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,065,346	759,261	891,261	977,851
Jasa-jasa	1,027,593	1,405,311	1,614,205	2,068,853
Produk Domestik Regional Bruto	9,108,017	11,973,254	13,117,938	15,032,651

Sumber: BPS Kota Bandung

**Tabel 2. Nilai produk Domestik Bruto Kota Bandung Atas Harga Konstan 1993 (dalam jutaan Rupiah)**

Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000
Pertanian	19,595	21,046	20,688	20.882
Pertambangan dan Hasil-Hasilnya				
Industri Pengolahan	1,722,126	1,413,088	1,457,459	1,592,420
Listrik, Gas dan Air Bersih	167,296	161,081	167,720	180,375
Bangunan/Konstruksi	469,050	303,901	300,990	323,052
Perdagangan	2,149,256	1,757,690	1,807,899	1,918,431
Pengangkutan dan Komunikasi	496,363	514,445	525,999	570,994
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	793,875	361,334	383,528	407,819
Jasa-jasa	775,667	762,368	779,068	792.375
Produk Domestik Regional Bruto	6,593,227	5,294,952	5,443,351	5,806,346

Sumber: BPS Kota Bandung

Jika dilihat dari strukturnya, maka baik data PDRB berdasarkan nilai nominal maupun berdasarkan harga konstan 1993 menunjukkan bahwa perekonomian kota Bandung pada dasarnya ditunjang oleh dua sektor utama, yaitu sektor

perdagangan dan industri pengolahan. Selama rentang waktu 1997 sampai dengan 2000, kedua sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar sekitar 60% dari total PDRB kota Bandung. Kontributor terkecil pada PDRB kota

Bandung adalah sektor pertanian dan pertambangan, dimana sektor pertambangan pada dasarnya memang tidak ada di kota Bandung. Hal lain yang juga perlu diperhatikan disini adalah kontribusi sektor jasa yang pada dasarnya secara relatif menunjukkan angka produksi yang relatif tidak berubah secara signifikan dalam rentang waktu 1997-2000 (lihat tabel 2).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya struktur ekonomi kota Bandung telah bertumpu pada sektor sekunder yang cenderung mengarah pada sektor primer.

Berdasarkan perkembangan struktur ekonomi tersebut, maka untuk menunjang dan meningkatkan efisiensi dari kinerja sektor penunjang utama dalam perekonomian kota Bandung, peran sektor keuangan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan sangat diperlukan. Jika dilihat secara riil, data sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersebut cenderung relatif menurun setelah masa krisis (dari sekitar 12% pada tahun 1997 menjadi sekitar 7% pada tahun berikutnya). Menurunnya kontribusi sektor tersebut merupakan akibat langsung dari krisis ekonomi tahun 1997. Walaupun demikian, berbeda dengan sektor-sektor lainnya, tahap pemulihan yang terjadi pada sektor ini relatif sangat lamban dan tidak signifikan

(bila dibandingkan dengan kondisi sebelum masa krisis). Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian yang relatif cukup serius, sebab keberadaan sektor ini penting bagi menunjang keberlangsungan sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian kota Bandung.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Dilihat dari aspek pertumbuhan, kondisi ekonomi Kota Bandung pada dasarnya telah kembali mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (sebesar 7% pada tahun 2000). Pertumbuhan ekonomi di tahun 2000 tersebut dapat tercapai dalam waktu yang relatif singkat setelah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 1998 sebagai akibat dari krisis ekonomi (-20%). Dalam waktu setahun, kota Bandung berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif kembali (3% di tahun 1999 diikuti 7% di tahun 2000).

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perekonomian kota Bandung memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dan memiliki kemampuan yang baik untuk berkembang. Dengan potensi tersebut, maka kondisi perekonomian kota Bandung, setidaknya bila dilihat berdasarkan besaran agregatif PDRB, akan dapat kembali pada posisi sebelum krisis dalam waktu yang relatif singkat (kurang dari 2 tahun).

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan Sektoral Kota Bandung**

Lapangan Usaha	1998	1999	2000
Pertanian	7%	-2%	1%
Pertambangan dan Hasil-Hasilnya			
Industri Pengolahan	-18%	3%	9%
Listrik, Gas dan Air Bersih	-4%	4%	8%
Bangunan/Konstruksi	-35%	-1%	7%
Perdagangan	-18%	3%	6%
Pengangkutan dan Komunikasi	4%	2%	9%
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-54%	6%	6%
Jasa-jasa	-2%	2%	2%
Produk Domestik Regional Bruto	-20%	3%	7%

Sumber: diolah dari data BPS Kota Bandung

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan sektoral kota Bandung setelah krisis ekonomi 1997, maka terlihat bahwa sektor yang paling parah terkena krisis adalah berturut-turut: Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; bangunan dan konstruksi; industri pengolahan dan perdagangan; listrik, gas dan air bersih; serta Jasa-jasa. Sementara, sektor pertanian dan sektor transportasi dan komunikasi masih mampu tumbuh secara positif (berturut-turut 7% dan 4%) pada tahun 1998.

Pertumbuhan positif disektor pertanian ini konsisten dengan pendapat umum bahwa sektor ini pada dasarnya merupakan sektor yang secara relatif diuntungkan oleh adanya krisis. Pada tahun 1999, sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2%. Hal ini terjadi mengikuti daya beli yang berkurang sebagai akibat penurunan aktivitas yang terjadi di sektor-sektor lainnya. Walaupun demikian, pada tahun 2000, sektor ini kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 1%. Pertumbuhan di tahun 2000 tersebut pada dasarnya bukan merupakan hal yang mengecewakan mengingat pertumbuhan sektor ini di Kota Bandung pada dasarnya memang sangat kecil. Hal ini mengingat bahwa struktur ekonomi kota Bandung memang telah bergeser ke arah sektor sekunder bahkan mengarah ke arah sektor tersier.

Berbeda dengan sektor pertanian, sektor transportasi dan komunikasi kota Bandung tidak pernah mengalami penurunan aktivitas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat kota Bandung pada dasarnya melayani fungsi sebagai sebuah kota transit bagi barang-barang produksi. Pada tahun 1998, sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan (4%) sebagai akibat krisis ekonomi. Ditahun berikutnya, pertumbuhan sektor ini kembali mengalami penurunan (2%) sebagai akibat dari turunnya aktivitas sektor-sektor pengguna jasa transportasi dan komunikasi di tahun sebelumnya.

Pada tahun 2000, sektor ini kembali mengalami pertumbuhan yang signifikan (9%). Hal ini tentu saja memberikan indikasi bahwa aktivitas sektor-sektor pengguna jasa sektor ini telah kembali bergairah. Lebih jauh lagi,

fenomena ini memperkuat keyakinan bahwa jika ditangani secara baik, perekonomian kota Bandung dapat dengan relatif cepat mengalami pemulihan.

Berbicara tentang pemulihan aktivitas ekonomi, indikasi yang sama juga telah muncul dari kecenderungan angka pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Bandung. Sektor penunjang utama (Industri pengolahan dan perdagangan) telah kembali tumbuh secara positif pada tahun 1999. Sektor industri pengolahan bahkan telah mampu tumbuh sebesar 9% di tahun 2000 (di atas tingkat pertumbuhan PDRB kota Bandung). Sektor bangunan dan konstruksi sebagai sektor yang paling lama terkena dampak krisis (mengalami penurunan aktivitas selama 2 tahun berturut-turut), bahkan telah mampu mengalami pertumbuhan 7% dalam aktivitasnya di tahun 2000. Sektor jasa keuangan dan penyewaanpun -- sebagai sektor penunjang kegiatan sektor penunjang utama dan paling parah terkena dampak krisis -- telah mampu tumbuh secara positif walaupun perlahan-lahan (lihat perbandingan tabel 3 dan tabel 2).

Secara bersama-sama, hal ini tentu saja memberikan indikasi positif bagi pemulihan kegiatan perekonomian kota Bandung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian ini. Walaupun demikian, konsistensi kebijakan tetap perlu diperhatikan guna mendukung berlangsungnya sentimen positif yang terjadi tersebut.

### 3. Perkembangan Harga Umum

Pada tabel 1 terlihat bahwa nilai PDRB Kota Bandung secara nominal terus mengalami peningkatan sejak tahun 1997 sampai dengan 2000. Akan tetapi, jika diperhatikan perkembangan yang terjadi dalam tabel 2, terlihat bahwa terjadi kecenderungan yang berlawanan, terutama pada tahun 1998.

Hal di atas memberikan indikasi bahwa trend kenaikan dalam nilai nominal PDRB kota Bandung tersebut pada dasarnya merupakan hasil kontribusi dari kenaikan tingkat harga secara umum. Untuk lebih lengkapnya, tabel 4 berikut ini menunjukkan perkembangan tingkat harga umum (yang diwakili oleh indikator

**Tabel 4. Laju Inflasi Deflator Sektoral Kota Bandung**

Lapangan Usaha	1998	1999	2000
Pertanian	102%	6%	9%
Pertambangan dan Hasil-Hasilnya			
Industri Pengolahan	74%	5%	2%
Listrik, Gas dan Air Bersih	26%	14%	4%
Bangunan/Konstruksi	69%	4%	-4%
Perdagangan	78%	4%	7%
Pengangkutan dan Komunikasi	32%	13%	11%
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	57%	11%	3%
Jasa-jasa	39%	12%	26%
Produk Domestik Regional Bruto	64%	7%	7%

Sumber: diolah dari data BPS Kota Bandung

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor pertanian secara relatif merupakan sektor yang terbebas dari dampak krisis secara langsung. Pertumbuhan produktivitas riil sektor ini pada tahun 1998 juga disokong oleh meningkatnya deflator sektor pertanian secara signifikan. Hal tersebut tentu saja membawa lonjakan keuntungan sesaat bagi mereka yang bergelut di sektor ini di kota Bandung. Pada tahun 1999, sejalan dengan penurunan daya beli relatif yang terjadi akibat penurunan aktivitas disektor-sektor ekonomi lainnya, perubahan tingkat harga umum disektor ini juga mengalami penurunan yang sangat tajam (dari 102% menjadi 6%).

Sektor-sektor lainnya, yang relatif terkena dampak negatif secara langsung dari krisis ekonomi yang terjadi, menunjukkan kecenderungan yang berbeda<sup>1</sup>. Kecenderungan laju perubahan deflator yang terjadi di tahun 1998 untuk sektor listrik gas dan air bersih, sektor transportasi dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecenderungan laju perubahan deflator sektor-sektor lainnya (yaitu: industri pengolahan, perdagangan,

konstruksi, dan jasa keuangan dan persewaan) untuk tahun yang sama.

Dengan kata lain, ketiga sektor yang disebutkan terlebih dahulu memiliki kecenderungan tingkat inflasi yang lebih rendah dari rata-rata tingkat inflasi kota Bandung (64%), sedangkan sektor-sektor sisanya memiliki kecenderungan tingkat inflasi yang lebih besar dari pada rata-rata tingkat inflasi kota Bandung pada tahun tersebut.

Dengan mengabaikan sektor pertanian (yang cenderung bersifat anomali), hasil pengamatan tersebut di atas menunjukkan indikasi bahwa faktor kenaikan harga merupakan salah satu kontributor besar dalam penurunan aktivitas sektor yang bersangkutan. Hal ini nampak jelas dari perkembangan pola pertumbuhan aktivitas sektoral pada tabel 3. Sektor-sektor yang mengalami tingkat inflasi di atas rata-rata inflasi kota Bandung pada tahun 1998 cenderung mengalami penurunan aktivitas di atas 15% (kecuali sektor pertanian); sedangkan sektor-sektor yang mengalami tingkat inflasi dibawah rata-rata tingkat inflasi kota Bandung cenderung mengalami penurunan aktivitas yang relatif jauh lebih moderat (dibawah 5%), bahkan untuk kasus sektor transportasi masih mampu mencatat peningkatan aktivitas. Pengamatan tersebut memberikan pesan tentang pentingnya perhatian otoritas

<sup>1</sup> Dalam hal ini, sektor perkembangan yang terjadi di sektor pertanian pada dasarnya merupakan anomali dari apa yang terjadi pada sektor-sektor lainnya.

perekonomian kota Bandung terhadap lonjakan tingkat harga secara sektoral.

Pada tahun-tahun berikutnya, kecenderungan perkembangan tingkat harga umum di kota Bandung telah mampu kembali relatif stabil, walaupun pada tingkat yang relatif cukup tinggi (7%). Jika dilihat secara sektoral, tingkat inflasi sektoral yang berada di atas rata-rata tingkat inflasi kota Bandung menunjukkan relatif lebih besarnya tekanan kelebihan permintaan pada sektor-sektor yang bersangkutan. Khusus untuk sektor konstruksi, pada tahun 2000 terjadi deflasi sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya krisis, sektor ini belum mampu bangkit kembali, bahkan mengalami kecenderungan terjadinya over supply dipasaran.

Dengan mengamati kecenderungan-kecenderungan yang terjadi tersebut, maka otoritas ekonomi setempat dapat mulai melakukan penataan prioritas pembangunan berdasarkan sektor ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga arahan kebijakan yang dilakukan dapat cenderung menjadi lebih tepat sasaran. Sebagai contoh: Pertumbuhan aktivitas sektor pertanian sebesar 1% pada tahun 2000, pada dasarnya belum cukup untuk memenuhi permintaan pada sektor tersebut untuk kota Bandung pada tahun yang bersamaan; sebaliknya, pertumbuhan 7% pada sektor konstruksi pada tahun yang sama, pada dasarnya melebihi daya serap pasar kota Bandung pada tahun tersebut.

Dengan demikian, strategi penataan prioritas pembangunan berdasarkan sektor di kota Bandung perlu mengalami pergeseran dengan meletakkan prioritas yang relatif jauh lebih rendah bagi pengembangan aktivitas sektor konstruksi. Hal yang sangat perlu dicatat disini adalah bahwa otoritas ekonomi setempat harus mampu melakukan penataan prioritas sektor dalam pembangunan ini secara berkala dalam waktu yang relatif singkat (paling tidak dalam jangka waktu tahunan) untuk mampu menghindari ketidaksesuaian yang terjadi di pasar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan yang relatif lebih serius terhadap aktivitas

perekonomian kota Bandung pada umumnya.

#### 4. Penutup

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur ekonomi kota Bandung pada dasarnya masih bersandar pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Walaupun demikian, hal ini juga diikuti dengan adanya indikasi bahwa struktur tersebut akan bergeser ke arah dominasi sektor pelayanan/jasa yang bersifat tersier.
2. Karakteristik ekonomi kota Bandung pada dasarnya memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dan memiliki kemampuan yang baik untuk berkembang. Hal ini terlihat dari kecenderungan perkembangan yang terjadi pada tingkat sektoral dalam ekonomi kota Bandung; dan hal ini juga yang mengakibatkan indikasi adanya kecenderungan ke arah pemulihan kondisi ekonomi kota Bandung telah mulai terlihat dan relatif dapat berlangsung cepat.
3. Adanya korelasi kuat antar fluktuasi tingkat harga umum secara drastis dengan kelangsungan kinerja aktivitas sektoral di kota Bandung. Disamping itu, indikator fluktuasi tingkat harga dan aktivitas sektor ekonomi, secara bersama-sama, memiliki potensi untuk dapat memberikan acuan yang baik bagi penyusunan skala prioritas pengembangan ekonomi sektoral untuk jangka waktu yang relatif pendek di kota Bandung.

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka implikasi kebijakan umum bagi otoritas perekonomian kota Bandung (dalam hal ini Pemda kota Bandung) adalah sebagai berikut:

1. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan perlu menjadi salah satu fokus untuk dibenahi mengingat sektor ini sangat berkaitan dalam memperlancar kinerja sektor-sektor yang menjadi penunjang utama ekonomi kota Bandung.

2. Konsistensi kebijakan pengembangan ekonomi perlu dilakukan dengan seksama, dengan didasarkan pada pengambilan kebijakan terpadu yang terkoordinasi antar sektor dalam organ pemerintahan. Konsistensi ini diperlukan pula untuk memanfaatkan potensi yang tertulis pada point kesimpulan ke dua di atas, sehingga potensi ekonomi kota Bandung tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna memperlancar proses pemulihan dan perkembangan selanjutnya ekonomi kota Bandung.
3. Penyusunan skala prioritas pengembangan sektoral dalam perekonomian kota Bandung perlu dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya informasi yang tersedia dari data historis untuk mampu membaca sentimen pasar. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan sentimen yang terjadi dalam pasar setiap sektor, sehingga dapat

menghindarkan ekonomi kota Bandung dari masalah-masalah perekonomian secara relatif lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

M.L.. Jhingan, 2001. Ekonomi Pembangunan & Perencanaan, Rajawali Pers,

Michael P. Todaro, 2000. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke-3, Erlangga, Jakarta.

H.W. Arnot, 1997. Pembangunan Ekonomi Indonesia, Gajah Mada University Pers.

**Ganjar Garibaldi, S.E.**  
adalah Dosen Biasa Fakultas Ekonomi  
Universitas Widyatama

